

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH DALAM PENGELUARAN KAS PADA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

Ambika Ismaya Indri Antika

NIM : G72216063



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI AKUNTANSI**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ambika Ismaya Indri Antika

NIM : G72216063

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi

Judul Skripsi : Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam  
Pengeluaran Kas Pada Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Ambika Ismaya Indri A.  
NIM. G72216063

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ambika Ismaya Indri Antika, NIM. G72216063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Februari 2020

Pembimbing,



Nurul Lathifah, S.A., M.A.

NIP. 19890582018012001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ambika Ismaya Indri Antika G72216063 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

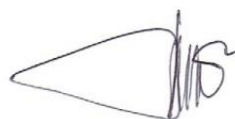
### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Nurul Lathifah, S.A., M.A  
NIP. 198905282018012001

Penguji II



Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc  
NIP. 198308082018012001

Penguji III



H. Abdul Hakim, MEL.  
NIP. 197008042005011003

Penguji IV



Mochammad Ilyas Junjuran, M.A  
NIP. 199303302019031009

Surabaya, 16 Maret 2020  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



  
Dr. H. M. Ali Arifin, MM  
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AMBIKA ISMAYA INDRI ANTIKA  
NIM : G72216063  
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI  
E-mail address : Ambikaindri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM  
PENGELUARAN KAS PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Penulis

(AMBIKA ISMAYA INDRI A.)



























Permasalahan yang terjadi pada Dinas PRKP Lamongan berkaitan dengan adanya kasus penggelapan dana yang terjadi di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan Pada tahun 2012 ketika Kepala Dinas PRKP ditetapkan menjadi tersangka karena kasus korupsi atas dana bantuan usaha.<sup>12</sup> Pada tahun 2014 terjadi kembali adanya dugaan korupsi oleh oknum Dinas PRKP yang saat itu juga menjabat sebagai Camat Lamongan atas dana proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.<sup>13</sup> Pada tahun 2019 Dinas PRKP kabupaten Lamongan dilaporkan karena adanya indikasi korupsi terkait dana pembangunan tugu Lamongan.<sup>14</sup>

Selain itu, dalam hal merekrut pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bidang tertentu di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan masih ada yang belum dari jurusan sesuai bidangnya, contohnya bagian akuntansi bukan dari akuntansi melainkan ekonomi dan manajemen serta adanya perangkapan tugas bagian keuangan dan akuntansi. Disamping itu belum maksimalnya dan meratanya kegiatan seperti pelatihan, seminar, workshop, ataupun pengadaan diklat atau bagi pegawai yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pengeluaran kas sehingga kurangnya pemahaman pegawai dibagian keuangan yang

---

<sup>12</sup> m.detik.com, *Kepala Dinas PU Cipta Karya Lamongan Kembali diperiksa*, diakses dari <https://m.detik.com/berita-jawa-timur-1924195/pada> 05 Oktober 2019 pukul 15.50 WIB

<sup>13</sup> Nurqomar, *Kejari Lamongan Selidiki Dugaan Korupsi PPIP*, diakses dari [poskotanews.com/2014/09/22](http://poskotanews.com/2014/09/22) pada 05 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB

<sup>14</sup> Bintangempat.com, *Tugu Lamongan Senilai 6 Milyar Terindikasi Korupsi* diakses dari [Bintangempat.com/2019/06/](http://Bintangempat.com/2019/06/) pada tanggal 12 Oktober 2019











## **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada pengeluaran kas di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pada pengeluaran kas di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan diantaranya :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang akuntansi pengendalian internal pada akuntansi pengeluaran kas serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti ataupun akademisi dalam bidang akuntansi, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Sebagai bahan informasi dan tambahan pengalaman bagi peneliti guna menambah atau memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengendalian internal dalam instansi Pemerintahan.

b. Bagi Dinas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan guna memperbaiki Pengendalian internal dalam Pengeluaran Kas dan berguna sebagai evaluasi dalam pengendalian internal dalam pengeluaran kas yang telah diterapkan.

c. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai acuan dan wawasan dserta dapat diimplementasikan ke dalam bidang lain. Sehingga muncul hasil penelitian dari sudut pandang yang berbeda-beda.

## **H. Definisi Operasional**

Penelitian ini dengan judul “Sistem Pengendalian Internal dalam Akuntansi Pengeluaran Kas pada Dinas PRKP Kab.Lamongan”.Maka diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman penelitian ini dan menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran. Definisi operasional dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sehingga merupakan komponen penting dalam tahap



untuk mengetahui keefektifan.<sup>16</sup>Efektivitas penting dalam pengeluaran kas karena bertujuan pada usaha untuk meningkatkan unsur efektivitas dari setiap aktivitas dalam organisasi.“Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan, semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”<sup>17</sup> Sehingga jika apa yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang dihasilkan atau tujuan dari perencanaan tersebut tercapai maka dapat dikatakan efektif.

## 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah serangkaian proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan dapat diandalkan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. yang berlaku. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

---

<sup>16</sup>Arikunto, S. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 124.

<sup>17</sup>Mahmudi. *Manajemen Sektor Publik*. (Yogyakarta :UPP AMP YKPN.2015), 173.

### 3. Pengeluaran Kas

Kas adalah aktiva lancar yang paling likuid dan merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya, artinya mudah untuk dicairkan sebagai uang. Pengeluaran kas merupakan suatu transaksi yang sering terjadi. Pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang disebabkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya kas.<sup>18</sup>

Sistem pengeluaran kas memiliki prosedur yang dirancang sedemikian rupa sehingga terhindar dari pencurian sama halnya dengan sistem penerimaan kas, oleh sebab itu ketika kehilangan kas ataupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat pengalokasiannya mudah diketahui. Prosedur sub sistem Akuntansi pengeluaran kas terdiri atas<sup>19</sup> :

- a. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- b. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- c. Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
- d. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- e. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- f. Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)

---

<sup>18</sup> Soemarso S. R., *Akuntansi Suatu Pengantar* ( Jakarta :Salemba Empat,2015), 72.

<sup>19</sup>Gabriella,*Analisis Penerapan SPI Kas*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi. Volume 15 no.04 th.2015

#### 4. Dinas

Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu atau segala sesuatu yang bersangkutan dengan jawatan (pemerintah), bukan swasta.<sup>20</sup>

### I. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan maksud menafsirkan suatu peristiwa atau kasus yang terjadi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif sehingga pengumpulan data pada penelitian ini Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh lalu diolah, dianalisis, dievaluasi dan disimpulkan.

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat dimana data dan variabel penelitian dapat diperoleh.<sup>22</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah Kasubag Keuangandan pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan.

Objek penelitian merupakan masalah yang diteliti. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

---

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/dinas>

<sup>21</sup> Arikunto, S. Penelitian suatu pendekatan praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 102.

<sup>22</sup> Ibid, 104

untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>23</sup> Objek penelitian ini adalah pengendalian internal pengeluaran kas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan selama 3 bulan yaitu pada bulan Desember 2019 – Februari 2020

### 4. Data yang dikumpulkan

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung selama proses penelitian di lapangan. Data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Struktur organisasi Dinas PRKP Kabupaten Lamongan
- b. Laporan keuangan periode 2017-2018
- c. Laporan akuntabilitas keuangan 2017-2018
- d. Dokumen lainnya terkait pengendalian internal pengeluaran kas

### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

#### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.<sup>24</sup>Sumber primer dalam penelitian ini

---

<sup>23</sup>Ibid, 104

<sup>24</sup>Muharto,dkk. *metode penelitian sistem informasi*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 93.

yaitu keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Bagian Keuangan, Staf Keuangan, dan Bendahara, dan dokumen-dokumen terkait Sistem dan prosedur dalam Pengeluaran Kas di Dinas PRKP Kab. Lamongan.

b. Sumber sekunder

Sumber Sekunder adalah data pendukung yang berfungsi sebagai penguat dari data primer yang diperoleh dari informasi tidak langsung.<sup>25</sup>Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur, jurnal, buku-buku, peraturan Pemerintah, dan sumber internet meliputi data yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam Pengeluaran Kas di Dinas PRKP Kab.Lamongan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan Penulis dalam teknik penyusunan laporan penelitian ini sebagai berikut <sup>26</sup>:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan responden. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pegawai yang berhubungan langsung

---

<sup>25</sup>Ibid, 93.

<sup>26</sup>Kusaeri, *Metodologi Penelitian*. (Surabaya : UINSA Press, 2015), 67.

dengan pengeluaran kas sehingga peneliti mendapatkan data-data secara langsung.

## 2) Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadi, karena penting untuk melihat perilaku dalam keadaan alamiah, melihat dinamika, dan gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada.

Dalam penelitian ini diteliti secara langsung pelaksanaan sistem pengendalian internal di setiap Sub bagian terkait dengan pengeluaran kas.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah data berupa berkas yang bersumber dengan subjek yang diteliti yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Penulis melakukan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan informasi berupa teori-teori maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem dan prosedur yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan, analisis, dan evaluasi informasi dan data di lapangan.

## 6. Teknik pengolahan data

Setelah data-data penelitian terkumpul dari proses pengumpulan data maka data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi yang dapat di pahami atau di mengerti. Teknik pengolahan yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut <sup>27</sup>:

### a. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. Peneliti menyusun data-data yang terkait dengan sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan.

### b. Editing

Yaitu proses memilih data, menerjemahkan data agar data yang diperoleh lebih bisa dibaca dan dipahami. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang didapat oleh Penulis dan digunakan sebagai sumber dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali semua data-data pada pengendalian internal pengeluaran kas yang diperoleh di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan .

---

<sup>27</sup>Ibid, 68.

c. Analyzing

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil organizing dan editing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori-teori sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti menganalisis antara data yang didapat di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan dengan teori yang menjadi acuan pada penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam analisis data meliputi<sup>28</sup> :

a. Reduksi Data

Peneliti menyeleksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pengeluaran kas, dokumen terkait, laporan keuangan, laporan kinerja, prosedur pengeluaran kas dan sistem pengendalian internal pemerintah pengeluaran kas yang diterapkan di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan dan meringkasnya serta mengelompokkan data secara ringkas.

b. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data yang telah di reduksi kemudian dianalisis dan dievaluasi berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran kas.

---

<sup>28</sup>Sugiono. metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi. (Bandung : Alfabeta, 2015), 247.



c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Setelah dianalisis, dievaluasi, dan diukur tingkat keefektivitasannya, Peneliti menarik kesimpulan seperti kelemahan pada sistem pengendalian internal pemerintah yang terkait dengan pengeluaran kas yang telah diterapkan di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan dan memberikan saran yang dapat berguna sebagai evaluasi di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan.

**J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini untuk mempermudah pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian dan supaya dapat memahami permasalahannya secara sistematis. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab 2 Kajian Teori

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang merinci tentang Sistem pengendalian internal pemerintah dan Pengeluaran kas.

3. Bab 3 Data Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum hasil penelitian meliputi pengeluaran kas, dokumen terkait, laporan keuangan, laporan kinerja, prosedur pengeluaran kas dan sistem pengendalian internal pemerintah pengeluaran kas yang diterapkan di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan.

### 3. Bab 4 Analisis Data

Pada bagian ini merupakan hasil dari analisis dari bab sebelumnya. Bab ini berisi tentang pengeluaran kas yang ada di Dinas PRKP kabupaten Lamongan ditinjau dari Sistem Pengendalian internal Pemerintah.

### 4. Bab 5 Penutup

Pada bagian ini merupakan suatu kesimpulan dari hasil analisis data sebagai jawaban dari permasalahan dan telah dilakukan evaluasi berdasarkan teori-teori yang digunakan serta berisi saran dari peneliti sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian dapat tercapai.

## BAB 2

### KAJIAN TEORI

#### A. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

##### 1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan<sup>29</sup>

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai berikut: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk memahami definisi di atas sebaiknya dipahami beberapa variabel definisi sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu<sup>30</sup>:

- a. Kriteria Penyelenggaraan SPIP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan Pimpinan dan Seluruh Pegawai. Penerapan

---

<sup>29</sup>Peraturan pemerintah no.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah

<sup>30</sup>Ibid, 4.

SPIP bukan sekedar formalitas untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan perundangundangan, SPIP harus diterapkan sebagai suatu budaya/kultur pengendalian (control culture) yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

- b. Kriteria tujuan penyelenggaraan penerapan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian penerapan SPIP ditujukan untuk menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Kriteria aktor penerapan yaitu dilaksanakan oleh Pimpinan dan Seluruh Pegawai dan diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Variabel ini menyatakan bahwa SPIP dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## 2. Penyelenggaraan SPIP

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 maka untuk menyelenggarakan SPIP diperlukan hal-hal sebagai berikut :

### a. Pengaturan penyelenggaraan

Pasal 58 UU No. 1 tahun 2004 menyatakan “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. System pengendalian intern sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Sebagaitindaklanjut, pemerintahtelahmenetapkan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP yang berlaku bagi penyelenggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalampasal 60 PP tahun 2008 disebutkan bahwa ketentuan penyelenggaraan SPIP di tingkat pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah dengan tetap berpedoman pada PP 60 tahun 2008.

Berdasarkan pada kedua pasal tersebut bahwa mandate instruktif untuk menyelenggarakan SPIP pada para kepala pemerintahan, yaitu presiden dengan peraturan pemerintah dan Kepala Daerah dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

#### b. Penyelenggaraan Kegiatan

Sesuai dengan pasal 2 angka (1) PP Nomor 60 tahun 2008 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Hal ini senada dengan pasal 6 UU No.17 tahun 2010 tentang pemegang kuasa pengelolaan keuangan, yaitu menteri,

pimpinan lembaga, dan Kepala Daerah. Selanjutnya, untuk mengatur penerapan SPIP diperlukan acuan, pedoman, atau sejenis.

c. Penerapan

Pasal 55 ayat 4 UU No. 1 tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 56 ayat 4 UU No. 1 tahun 2004 menyatakan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan SPIP pada suatu instansi pemerintah diperlukan acuan, pedoman, dan sejenis untuk menerapkan instrument-instrumen pengendalian termasuk pemeliharaan lingkungan pengendalian.

### 3. Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP

Pada pasal 43 PP No. 60 tahun 2008 dinyatakan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing”.

### 4. Unsur-Unsur SPIP

Unsur- unsur SPIP mengacu pada konsep sistem pengendalian Intern yang dikemukakan oleh COSO ,Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP memiliki lima unsur penting sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Lingkungan Pengendalian.
- b. Penilaian Risiko.
- c. Aktivitas Pengendalian.
- d. Komunikasi dan Informasi
- e. Pemantauan

Penjelasan mengenai lima unsur pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian

Sebagaimana dimaksud diciptakan oleh pimpinan instansi pemerintah yang merupakan dasar fondasi SPIP melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika, dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang

---

<sup>31</sup> Ibid,9.

baik serta melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai

- 2) Komitmen terhadap kompetensi, agar tidak tergantung satu orang
- 3) Kepemimpinan yang kondusif.
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

b. Penilaian risiko

hingga tujuan suatu kegiatan berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena risiko merupakan sesuatu yang ada unsure ketidakpastian dan tidak pasti kapan akan terjadi.

c. Aktivitas Pengendalian.

Penerapan aktivitas pengendalian menurut pasal 16 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2008, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :



- 1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
- 2) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
- 3) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- 4) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis

d. Komunikasi dan Informasi.

Unsur komunikasi dan informasi merupakan pencerminan interaksi antar strata pemerintahan dan/atau antara pimpinan, pegawai, dan metode kerja dalam mencapai tujuan dan/atau kinerja yang ditetapkan. Komunikasi dan informasi wajib diselenggarakan dengan efektif dan untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif maka pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern

Pemantauan adalah pencerminan penerapan kegiatan pengendalian dan komunikasi pengendalian yang terus menerus dilakukan pada suatu instansi pemerintah.

## B. Pengeluaran Kas

### 1. Pengertian kas

Kas adalah segala sesuatu, baik yang diterima berbentuk uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Kas terdiri dari saldo kas (cash and hand) dan rekening giro serta kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan-perubahan yang signifikan.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan pos aktiva dalam neraca yang paling liquid, maksudnya mudah dipergunakan sebagai alat pertukaran uang tunai dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat diuangkan setiap saat apabila perusahaan membutuhkan.

### 2. Pengertian Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Pengeluaran kas dapat dilakukan dengan

---

<sup>32</sup> Soemarso S. R., Akuntansi Suatu Pengantar( Jakarta :Salemba Empat,2015),296.

menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya yang jumlahnya relatif kecil.<sup>33</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai, dan atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya.

### 3. Anggaran Kas Pengeluaran

Anggaran kas pengeluaran memuat perkiraan kebutuhan dana untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulan dan triwulan selama satu tahun anggaran. Pengeluaran-pengeluaran meliputi belanja langsung dan tidak langsung.<sup>34</sup> Dalam prosedur pembayaran, belanja dikelompokkan menjadi dua, yaitu<sup>35</sup> :

- a. Belanja uang persediaan (UP)/ Pergantian uang (GU)/ Tambahan uang (TU)

Dokumen dalam akuntansi penegluran kas Uang Persediaan

- Surat penyediaan dana
- Surat permintaan pembayaran uang persediaan
- Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan
- Surat perintah membayar uang persediaan

<sup>33</sup>Ibid, 297.

<sup>34</sup> Mahmudi, manajemen keuangan daerah (Jakarta : Erlangga.2013), 102.

<sup>35</sup>Erlina, dkk. Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual (Jakarta:salemba empat.2015), 121.

- Surat perintah membayar tambahan uang persediaan
  - Surat perintah pencairan dana
  - Bukti transfer
  - Nota debit bank
  - Bukti jurnal pengeluaran kas
  - Buku besar
  - Buku besar pembant
- b. Belanja langsung

Dokumen yang digunakan:

- Surat penyediaan dana
- Surat permintaan pembayaran langsung
- Surat perintah membayar langsung
- Surat perintah pencairan dana
- Bukti transfer
- Nota debit bank
- Buku jurnal pengeluaran kas
- Buku besar
- Buku besar pembantu

Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sistem pengeluaran kas adalah serangkaian proses mulai pencatatan,

penggolongan dan peringkasan transaksi dan / atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPKD dan /atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.<sup>36</sup>

#### 4. Prosedur pengeluaran kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dasar atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.<sup>37</sup>

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sering disebut dengan SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu Badan Layanan Umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas

---

<sup>36</sup>Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah.*( Jakarta: Salemba Empat.2018), 46.

<sup>37</sup> Ibid,48

pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu dan selaku pengguna barang di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Pada dasarnya prosedur pengelolaan kas bertujuan untuk<sup>38</sup>:

- a. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai kas dari pengakuan sampai proses penerimaan.
- b. Mendapatkan data atau catatan yang akurat tentang kas sesuai dengan *input* dari masing-masing dinas/unit kerja.
- c. Mendukung pembuatan keputusan personel yang mengendalikan fungsi kas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD adalah serangkaian proses, baik manual maupun menggunakan teknologi dalam mengerjakan, mulai dari pencatatan, penggolongan sampai mendapatkan data yang akurat tentang penggunaan kas.

---

<sup>38</sup>Ibid, 49.

Prosedur sub sistem Akuntansi pengeluaran kas terdiri atas<sup>39</sup> :

- a. Penerbitan Surat Penyediaan Dana ( SPD)
- b. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- c. Penerbitan Surat Permintaan Membayar ( SPM)
- d. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- e. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- f. Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)



---

<sup>39</sup>Gabriella, *Analisis Penerapan SPI Kas*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi. Volume 15 no.04 th.2015











- a. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
  - 1) Kepala Seksi Perumahan.
  - 2) Kepala Seksi Kawasan Permukiman.
  - 3) Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Umum dan Penerangan Jalan.
- b. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan:
  - 1) Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
  - 2) Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah
  - 3) Kepala Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Ruang
  - 4) Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman.
  - 5) Kepala Seksi Air Minum
  - 6) Kepala Seksi Persampahan
  - 7) Kepala Seksi Pertamanan.

Dalam menjalankan tugas–tugas teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan dibantu oleh 6 unsur pelaksana teknis Operasional dilapangan yang terdiri dari :

- c. Unit Pelaksana Teknis IPLT Lamongan
- d. Unit Pelaksana Teknis Alun-alun, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum





- 6) pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja
- 7) pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi dinas
- 8) pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya
- 9) pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan
- 10) penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
- 11) pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil
- 12) pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksan
- 13) penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya
- 14) pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas
- 15) pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya sesuai lingkup tugasnya
- 16) pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;











a. Bukti transfer yang merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. Bukti transaksi atau dokumen merupakan keterangan tertulis pada setiap transaksi-transaksi yang dilakukan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 2) Nota debit bank
- 3) Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. Bukti transaksi dilengkapi dengan:
  - a) Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
  - b) Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
  - c) Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang atau jasa
- 4) Jurnal yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas.

- 5) Buku besar kas yang merupakan ringkasan catatan (*posting*) yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk menggolongkan semua transaksi, baik penerimaan kas, pengeluaran kas, maupun transaksi nonkas.
  - 6) Buku besar pembantu pengeluaran kas yang merupakan ringkasan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk menggolongkan transaksi-transaksi pengeluaran kas menurut rincian yang dianggap perlu.
3. Prosedur pengeluaran kas

Prosedur pengeluaran kas yang dilakukan oleh Dinas PRKP Kabupaten Lamongan mencakup belanja modal dan operasional. Pengeluaran kas untuk barang dan jasa bukan dilakukan oleh bendahara pada Dinas tersebut, melainkan oleh bendahara umum daerah (BUD) yang sebelumnya dibuat surat penyediaan dana oleh pengguna / kuasa pengguna anggaran pada SKPD tersebut lalu diminta persetujuannya kepada BUD untuk dicairkan. Untuk belanja pegawai dilakukan oleh pengguna / kuasa pengguna anggaran, tetapi pencairannya langsung ke rekening bank pegawai masing-masing. Dasar hukum pelaksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah termasuk Dinas PRKP Kabupaten Lamongan sebagai pengguna anggaran adalah DPA SKPD yang telah disetujui oleh sekretaris daerah dan disahkan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah. Persetujuan sekretaris daerah ditandai dengan penandatanganan





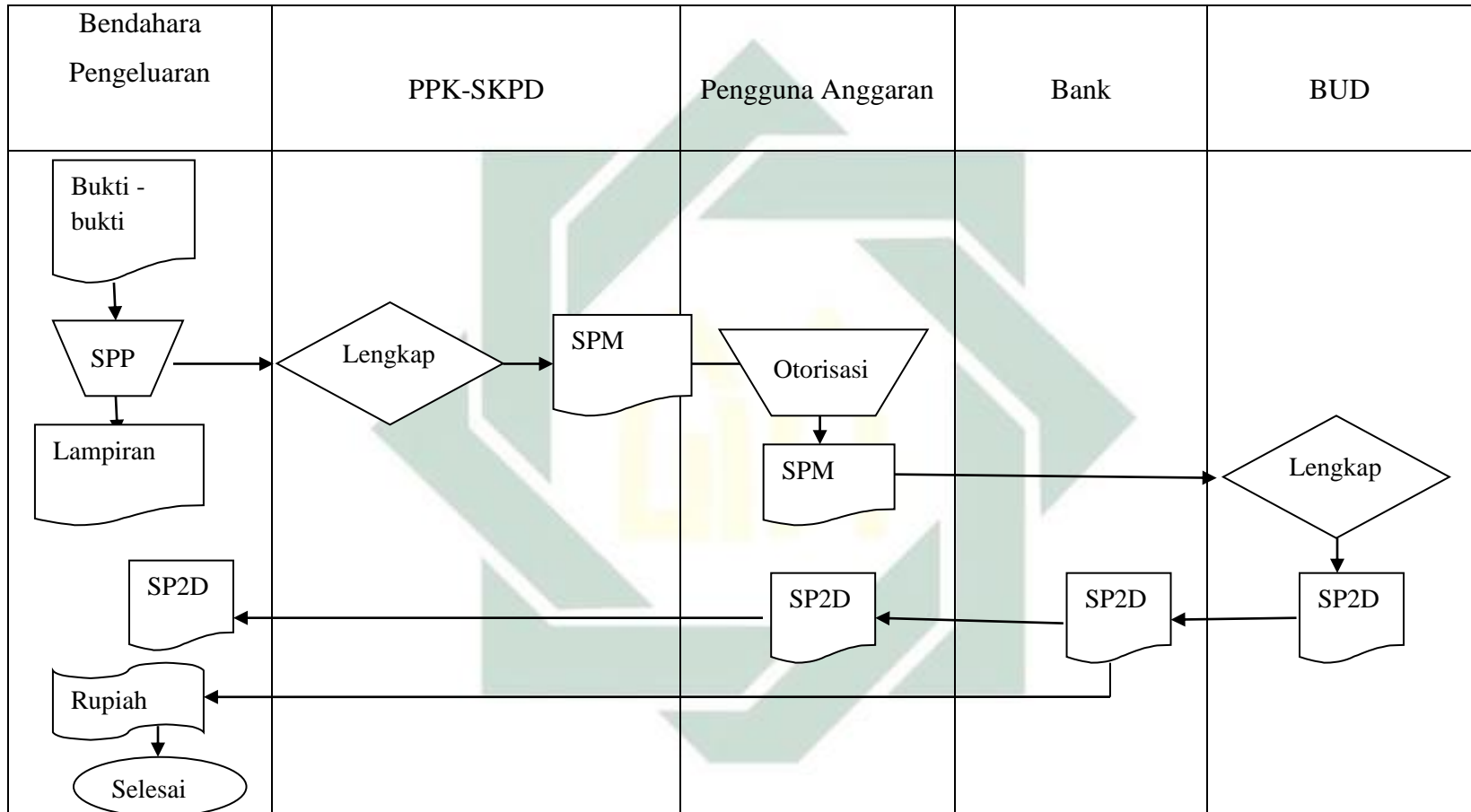












Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Gambar 3.2 Alur Prosedur pengeluaran kas non tunai di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1 Pengeluaran Kas Tahun 2017-2018 di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan

## Belanja operasional

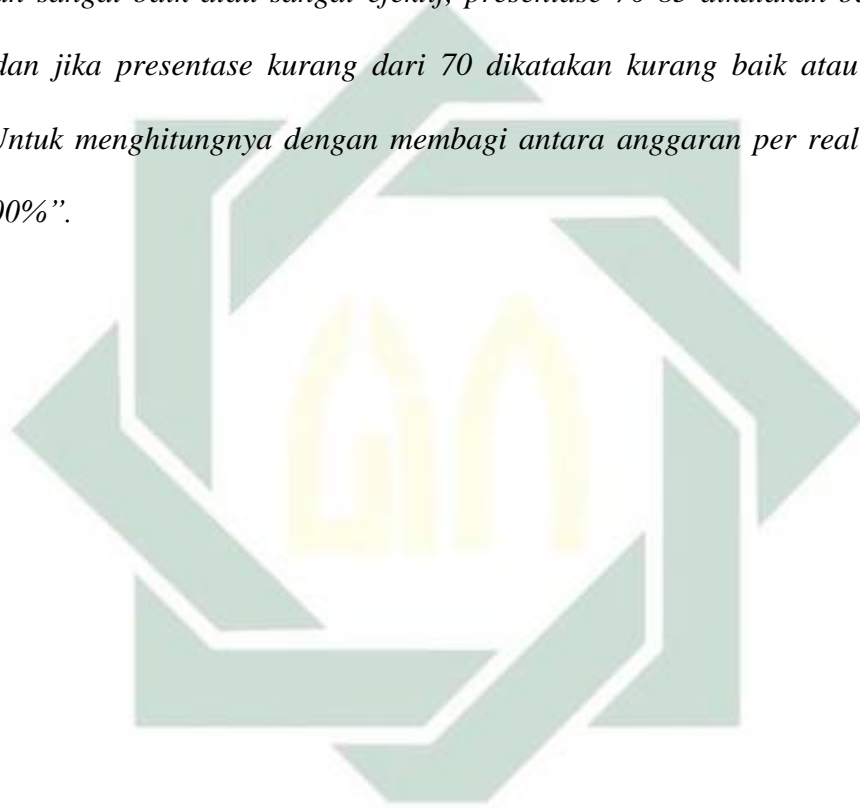
Uraian	Anggaran n 2018	Realisasi 2018	%	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%
Belanja Pegawai	6.919.61 2.000	6.703.896.3 73	96,88	8.634.028.00 0	8.262.565.02 6	95,70
Belanja Barang dan Jasa	34.790.9 17.300	33.608.232. 402	96,60	35.411.906.8 00	33.410.718.5 59	94,35
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	275.000. 000	274.700.000	99,89	1.200.000.00 0	1.164.442.00 0	97,04
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasional	41.985.5 29.300	40.586.828. 775	96,67	45.245.934.8 00	42.837.725.5 85	94,68

## Belanja modal

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%
Belanja Tanah	5.418.844.000	5.325.277.700	98,27	3.488.475.000	3.170.150.000	90,87
Belanja peralatan dan mesin	3.712.211.000	3.650.569.000	98,34	1.682.605.000	1.649.446.900	98,03
Belanja gedung dan bangunan	50.941.035.000	59.099.469.781	99,56	62.454.650.000	58.396.625.545	93,50
Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	50.941.035.000	49.412.597.210	97,00	27.767.467.000	27.525.791.100	99,13
Belanja aset tetap lainnya	-	-	-	-	-	-
Belanja aset lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah belanja modal	119.433.590.000	117.487.913.691	98,37	95.393.197.500	90.742.013.585	95,12

Sumber : Dinas PRKP Kabupaten Lamongan

Untuk mengukur tingkat keefektivan pengeluaran kas di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan maupun mengukur capaian kinerja Bu nayla selaku kasubag program, evaluasi dan keuangan mengatakan “ *Untuk menilai tingkat keefektivasannya kita ada indikatornya atau skoring tolak ukurnya. Jika presentase antara 85-100 dikatakan sangat baik atau sangat efektif, presentase 70-85 dikatakan baik atau efektif dan jika presentase kurang dari 70 dikatakan kurang baik atau kurang efektif. Untuk menghitungnya dengan membagi antara anggaran per realisasinya dikali 100%*”.



## **BAB 4**

### **HASIL ANALISIS**

#### A. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam pengeluaran kas di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif, khususnya dalam pengeluaran kas perlu adanya sistem pengendalian internal. Dalam penyusunan laporan keuangan berpedoman pada sistem pengendalian internal agar memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah. Adapun implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan meliputi :

1. Penyelenggaraan SPIP
  - a. Pengaturan penyelenggaraan

Dinas PRKP Kabupaten Lamongan telah menerapkan SPIP dengan berpedoman pada peraturan pemerintah no. 60 Tahun 2008 mengenai sistem pengendalian internal pemerintah dan untuk prosedur pengeluaran kasnya berpedoman pada peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah.



b. Penyelenggaraan kegiatan

Dalam menyelenggarakan kegiatan pengeluaran kas pihak Dinas melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran kas yaitu dengan berpedoman pada prosedur pengeluaran kas pada pengelolaan keuangan daerah dan dengan beracuan pada unsur-unsur SPIP misalnya menyelenggarakan kegiatan dengan memberlakukan otorisasi setiap dokumen pengeluaran kas hanya oleh pejabat yang berwenang adanya pengendalian fisik atas dokumen dan catatan atas transaksi diarsipkan, diskusi dan evaluasi dengan para pegawai yang ada agar pengendalian intern semakin memadai.

c. Penerapan

Penerapan SPIP di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan dibuktikan dengan adanya pernyataan didalam laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP

Pimpinan Dinas PRKP Lamongan sebagai penanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Dinas PRKP Kabupaten Lamongan sedangkan untuk pengendalian internal dalam pengeluaran kas penanggung jawabnya adalah kasubag

evaluasi, program, dan keuangan dibawah pimpinan Dinas PRKP Kabupaten Lamongan.

### 3. Unsur-Unsur SPIP

#### a. Lingkungan Pengendalian

##### 1) Integritas dan nilai etika

Dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari dipengaruhi oleh nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para pimpinan dengan menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur

##### 2) Komitmen terhadap Kompetensi

Selalu mengembangkan potensi para tenaga kerja dengan selalu mengarahkan mereka untuk bekerja secara professional serta memberikan pelatihan- pelatihan yang dijadwalkan oleh BPKAD

##### 3) Kepemimpinan yang kondusif

Pimpinan melakukan interaksi dengan para pegawai yang ada dan selalu melakukan diskusi kepada para pegawai agar pengendalian intern semakin memadai, dan memberikan sikap yang positif dan responsive terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran.

##### 4) Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan di Dinas

tersebut dengan memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab

- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat kepada pegawai sesuai tanggungjawabnya, namun terdapat juga perangkapan tugas oleh pegawai bagian keuangan yang juga mengerjakan fungsi akuntansi
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dalam merekrut sumber daya manusia dengan penetapan kebijakan dan prosedur dari tahap rekrutmen sampai dengan pemberhentian dan pemensiunan pegawai
- 7) Perekrutan sumber daya manusia melalui serangkaian test dan klasifikasi yang ditentukan oleh bagian SDM, namun masih terdapat pegawai khususnya di bagian keuangan yang berkaitan dengan kas yang kurang mengerti atau pemahaman terkait pengeluaran kas seperti dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas dan peraturan mengenai SPIP

b. Penilaian Resiko

Dalam melakukan analisa resiko telah adanya bagian verifikasi untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Dinas, sehingga setiap laporan keuangan dicek ulang oleh bagian verifikasi apakah sudah sesuai atau belum.

c. Aktivitas Pengendalian

- 1) Menerapkan sistem otorisasi atas dokumen pengeluaran kas seperti cap dan tanda tangan dari pejabat yang berwenang namun pernah beberapa kali Pembuatan Surat perintah transfer dana yang mengalami keterlambatan, disebabkan karena dokumen pendukung pembuatan SPTD yang belum lengkap pada saat proses pembuatan SPTD. Adanya keterlambatan atas dokumen contohnya belum lengkapnya dokumen pendukung pembuatan SPTD yaitu daftar pembayaran yang terlambat ditandatangani oleh pihak ketiga dan pengguna anggaran yang tidak ada di tempat pada saat penandatanganan dokumen SPTD.
- 2) Pengendalian fisik atas dokumen dan catatan atas transaksi diarsipkan namun belum maksimal karena dokumen-dokumen penting diletakkan di rak lemari terbuka yang berisiko dokumen hilang atau digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh orang yang tidak berwenang.
- 3) Adanya peraturan tertulis mengenai sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008

- 4) Adanya prosedur pengeluaran kas secara tertulis berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2018 tentang sistem dan prosedur perbendaharaan keuangan daerah

d. Informasi dan Komunikasi

Jika ada ketidakjelasan pada aktivitas pengeluaran kas maka bagian-bagian yang terkait dengan pengeluaran kas akan melakukan konfirmasi terkait dengan ketidakjelasan. Laporan mengenai aktivitas pengeluaran kas dalam laporan keuangan tidak dipublikasikan kepada masyarakat didalam websitenya.

e. Pemantauan

Mendapat pengawasan dari Inspektorat dan BPKP. Pengawasan dilakukan per semester sedangkan Pengawasan secara internal di lingkungan Dinas dan dibagian keuangan sendiri dilakukan per semester sedangkan untuk evaluasi kinerja pegawai dan laporan keuangan dilakukan setiap bulan serta akuntabilitas pelaporan keuangan dilakukan per semester.

B. Evaluasi unsur-unsur SPIP pengeluaran kas dalam perspektif PP.No.60 Tahun 2008

Adapun penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran kas pada Dinas PRKP Kabupaten Lamongan pada dasarnya sudah cukup baik jika diamati, berikut jika dinilai berdasarkan unsur – unsur sistem pengendalian intern :

## 1. Lingkungan Pengendalian

Nilai integritas dan etika yang ditanamkan oleh pimpinan sudah tepat karena bekerja dengan integritas dan mengambil sikap atau tindakan yang tegas dan disiplin terhadap pelanggar kebijakan ataupun prosedur yang diterapkan di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan. Adapun Struktur organisasi dari Dinas PRKP Kabupaten Lamongan sudah tergambar jelas dimana bagian program, evaluasi, dan keuangan yang menyangkut pengendalian internal dan pengeluaran kas langsung berada dibawah komando dari Pimpinan.

Dinas PRKP Kabupaten Lamongan belum mempunyai profesional akuntan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan juga sumber daya manusia di bidang keuangan belum memadai hal ini terjadi karena tenaga kerja yang ada untuk bagian ini kebanyakan sudah tua sehingga terkadang aktivitas operasional kurang efektif dan laporan keuangan menjadi tidak tepat waktu. Serta belum maksimalnya dan meratanya kegiatan seperti pelatihan, seminar, workshop, ataupun pengadaan diklat bagi pegawai dibagian keuangan sehingga pegawai kurang paham mengenai hal yang berkaitan dalam pengeluaran kas contohnya dokumen yang dibutuhkan dalam pengeluaran kas.

## 2. Penilaian Resiko

Dalam melakukan analisa resiko sudah sesuai karena telah dibentuk bagian verifikasi khusus untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Dinas, sehingga laporan keuangan yang sudah diselesaikan dicek ulang keakuratannya. Dokumen-dokumen pengeluaran kas serta prosedur dalam pengeluaran kasnya pun sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah terkait. Untuk satu tahun terakhir pengeluaran kas dilakukan dengan non tunai sehingga risiko kecurangan lebih bisa diminimalisir.

## 3. Aktivitas Pengendalian

Prosedur pengendalian di Dinas PRKP Kabupaten Lamongan sudah cukup baik hal ini karena pihak Dinas memberlakukan otorisasi setiap dokumen pengeluaran kas oleh pejabat yang berwenang hanya saja dalam penandatanganan dokumen pernah mengalami keterlambatan dikarenakan pejabat yang berwenang tidak ada di kantor. Dalam proses administrasi pencairan dana atau transfer dana agar tidak mengalami keterlambatan maka proses pengumpulan dokumen dan pembuatan SPTD harus dipercepat. SPTD sebaiknya dibuat paling lambat sehari sebelum pencairan dana atau sebelum tanggal jatuh tempo pencairan dana, agar pada saat jatuh tempo tidak mengalami keterlambatan mentransfer dana atau mencairkan dana. Keterlambatan pencairan dana seperti ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

Untuk pengguna anggaran sebaiknya berada ditempat pada saat pencairan dana dan bendahara perlu berkoordinasi dengan pengguna anggaran kapan saja tanggal-tanggal pencairan dana. Jika pada saat pencairan dana pengguna anggaran memiliki tugas luar maka bendahara dapat menanggulangnya dengan membuat dokumen pencairan dana sehari lebih cepat sebelum pengguna anggaran melaksanakan tugas luar.

Untuk aktivitas pengeluaran kas pada tahun 2018 sudah efektif dan dikendalikan dengan baik hal itu dapat dilihat dari presentase pengeluaran kas yang diatas 90%.

Pengendalian fisik atas dokumen dan catatan atas transaksi yang diterapkan belum maksimal. Untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan atas dokumen dan catatan yang ada didalamnya sebaiknya ditempatkan di lemari khusus dan dikunci sehingga hanya orang atau pihak yang berwenang saja yang boleh menggunakannya. Selain itu untuk peminjaman dokumen dan catatan tersebut perlu dilengkapi dengan bukti peminjaman dan diarsipkan.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi Namun cukup baik dari segi internal pihak Dinasetiap pengeluaran kas harus dilaporkan kepada kepala bagian keuangan dan dari bagian keuangan kepada pimpinan setiap bulannya,



kasubag juga melakukan evaluasi bersama pegawai keuangan untuk mengevaluasi dan memperbaiki apa yang masih kurang.

Namun untuk informasi mengenai laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja keuangan tidak dipublikasikan kepada masyarakat tiap tahun. Harusnya dipublikasikan agar masyarakat mengetahui akuntabilitas kinerja keuangan dinas tersebut baik dari segi laporan keuangan, program yang dicapai, dll.

#### 5. Pemantauan

Pemantauan atau pengawasan sudah baik karena mendapat pengawasan dari Inspektorat dan BPKP secara berkelanjutan. Adanya pengawasan dan evaluasi kinerja secara internal di Dinas dan Bagian keuangan tersebut secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Namun auditor internal tidak melakukan pemeriksaan secara mendadak melainkan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, sehingga bagian keuangan mengetahui kapan auditor ingin mengaudit pengeluaran kasnya.

Dibawah ini rangkuman tabel evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran kas pada dinas PRKP Kabupaten Lamongan berdasarkan unsur-unsur pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut :



















## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2016.
- Darise, Nurlan. *Akuntansi Keuangan Daerah* .Jakarta: Badan penerbit Indeks. 2013.
- Erlina, dkk. *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual* Jakarta: Salemba Empat. 2015
- Febrian Singgima dan Sherly Pinatik. *Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Ekonomi, manajemen, bisnis, akuntansi. Volume 4 No.1. 2016.
- Greivy Panambunan dan Jantje J. Tinangon *Evaluasi Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Manado*. Jurnal Riset Ekonomi , manajemen, bisnis, akuntansi. Volume 4 No. 2016.
- Gabriella, dkk. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Jurnal berkala ilmiah efisiensi. Volume 15 No.04. 2015.
- Hakim, Abdul Aziz, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah :di Era Demokrasi Langsung*. Yogyakarta:Toga Press. 2006
- Kusaeri. *Metodologi Penelitian*. Surabaya : UINSA Press. 2015
- Mahmudi, dkk. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 2016.
- Marchell, dkk. *Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Di Rsu Pancaran Kasih Gmim Manado*. Jurnal Riset Ekonomi , manajemen, bisnis, akuntansi. Volume 3 No.3. 2015.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat. 2016
- Peraturan pemerintah no.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah*
- Pusat Ilmu Ekonomi. *Pengertian Kas*. Makassar: Propesorna IE. 2011.

- Pricilla, dkk. 2018. *Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Dppkad Kab.Bolaang Mongondow Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, manajemen, bisnis, akuntansi*. Volume 4 no.3
- Samryn,LM. *Pengantar Akuntansi:mudah membuat jurnal dengan pendekatan siklus transaksi*. Jakarta:Rajawali Pers. 2014.
- Sugiono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Yogyakarta : BPFE. 2015.
- Soemarso S. R.*Akuntansi Suatu Pengantar*.Jakarta : Salemba Empat.2015.
- Bintangempat.com. 2019.*Tugu Lamongan Senilai 6 Milyar Terindikasi Korupsi*.<https://Bintangempat.com/2019/06/tugu-lamongan-senilai-6-milyar-terindikasi-korupsi/>(Diakses pada 12 Oktober 2019 16.00 WIB)
- M.detik.com. 2012.*Kepala Dinas PU Cipta Karya Lamongan Kembali diperiksa*.<https://m.detik.com>berita-jawa-timur/d-1924195/kepala-dinas-pu-cipta-karya-lamongan-kembali-diperiksa> ((Diakses pada 05 Oktober 2019 15.50 WIB)
- Nurqomar. 2014. *Kejari Lamongan Selidiki Dugaan Korupsi PPIP*. [https:// Poskotanews.com/2014/09/22/kejari-lamongan-selidiki-dugaan-korupsi-ppip/](https://Poskotanews.com/2014/09/22/kejari-lamongan-selidiki-dugaan-korupsi-ppip/) (Diakses pada 05 Oktober 2019 16.00 WIB)